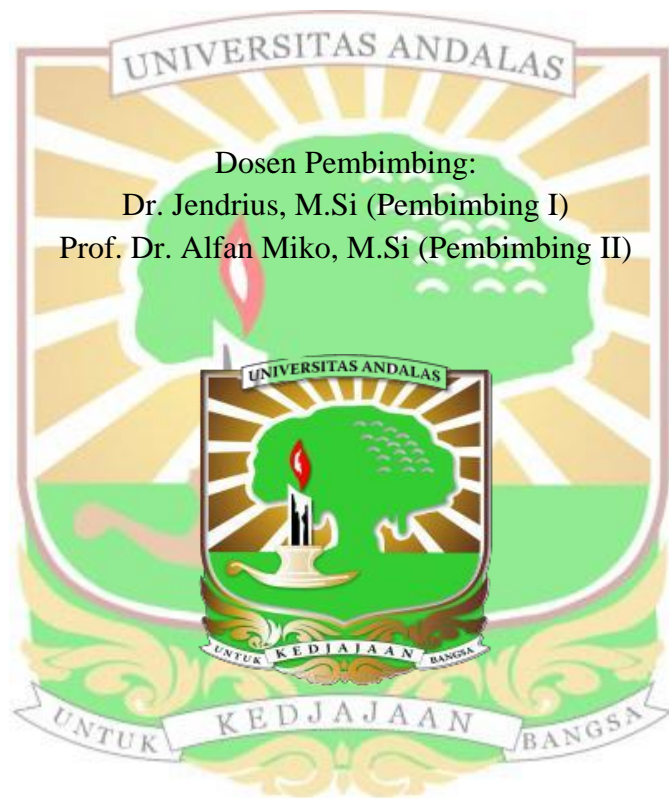


**KONFLIK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT DI  
NAGARI SUNGAI KAMUYANG**

**TESIS**

**OLEH:  
REDNI PUTRI MELDIANTO  
NIM. 2220812001**



Dosen Pembimbing:  
Dr. Jendrius, M.Si (Pembimbing I)  
Prof. Dr. Alfian Miko, M.Si (Pembimbing II)

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

## ABSTRAK

Konflik pengelolaan tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks di antara berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bertentangan. Konflik ini muncul dari perbedaan interpretasi hak pengelolaan tanah ulayat, fragmentasi dalam struktur adat, dan pengaruh kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik serta menganalisis penyebab utama konflik tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor utama, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), KAN versi MUBESLUB, Wali Nagari, masyarakat adat, dan instansi pemerintah terkait. Selain itu, analisis dokumen hukum dan arsip adat dilakukan untuk melacak akar konflik dan dinamika pengelolaan tanah ulayat. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antar-aktor, dinamika kekuasaan, dan faktor struktural yang memicu konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar-aktor didominasi oleh ketegangan akibat konflik kepentingan dan lemahnya kepercayaan antar-pihak. Perbedaan pandangan antara KAN lama dan KAN versi MUBESLUB mengenai pengajuan Hak Pengelolaan (HPL) menjadi sumber utama ketegangan. Selain itu, kepentingan ekonomi yang melibatkan pemerintah dan investor sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat yang berupaya mempertahankan hak atas tanah ulayat.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik pengelolaan tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terkait dengan dinamika struktural yang lebih luas, termasuk modernisasi hukum, tekanan pembangunan ekonomi, dan marginalisasi sistem adat dalam pengambilan keputusan. Hubungan antar-aktor menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pemerintah dan investor memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan masyarakat adat. Fragmentasi internal, seperti pembentukan KAN versi MUBESLUB, juga mencerminkan pola resistensi masyarakat terhadap aktor-aktor yang dianggap tidak mewakili kepentingan adat.

Diskusi ini menekankan perlunya pendekatan resolusi konflik berbasis transformasi yang melibatkan seluruh aktor secara inklusif. Pendekatan ini harus mencakup mediasi yang menghormati prinsip-prinsip adat, pemberdayaan masyarakat lokal, serta integrasi kebijakan pemerintah yang memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami konflik tanah ulayat sebagai bagian dari perdebatan antara tradisi dan modernitas di Minangkabau.

## ***ABSTRACT***

The customary land management conflict in Nagari Sungai Kamuyang reflects complex power dynamics among various actors with conflicting interests. The conflict arises from different interpretations of customary land management rights, fragmentation within customary structures, and the influence of government policies. This study aims to identify the relationship between the actors involved in the conflict and analyze the main causes of the conflict.

This research used a qualitative approach with a case study design. Data was collected through in-depth interviews with key actors, including the Kerapatan Adat Nagari (KAN), the MUBESLUB version of the KAN, the Wali Nagari, indigenous people, and relevant government agencies. In addition, legal documents and customary archives were analyzed to trace the roots of conflict and the dynamics of customary land management. Data were thematically analyzed to identify patterns of inter-actor relations, power dynamics, and structural factors that trigger conflict.

The results showed that inter-actor relations were dominated by tensions due to conflicts of interest and weak trust between parties. Differences in views between the old KAN and the MUBESLUB version of the KAN regarding the application for Management Rights (HPL) are the main source of tension. In addition, economic interests involving the government and investors often clash with the interests of indigenous peoples who seek to defend customary land rights.

The findings of this study reveal that customary land management conflicts in Nagari Sungai Kamuyang are not only local in nature, but are also linked to broader structural dynamics, including legal modernization, economic development pressures, and the marginalization of customary systems in decision-making. Inter-actor relations show an imbalance of power, where the government and investors have greater influence than indigenous peoples. Internal fragmentation, such as the formation of the MUBESLUB version of the KAN, also reflects patterns of community resistance to actors perceived as not representing customary interests.

The discussion emphasized the need for a transformation-based conflict resolution approach that involves all actors inclusively. This approach should include mediation that respects customary principles, empowerment of local communities, and integration of government policies that take into account social, cultural and environmental sustainability. This research makes an important contribution to understanding customary land conflicts as part of the debate between tradition and modernity in Minangkabau.